

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderating

Aisyah Nur Hidayah^{1*}, Vita Fitria Sari²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: anur52084@gmail.com

Abstract

The place of research is in the office of the Regency/City Government of West Sumatra Province. The research sample is LKPD time series data in the form of district and city APBD and LRA in West Sumatra Province from 2016-2019. The approach uses moderated regression analysis (MRA). The study concluded that the ratcheting effect occurred on the PAD budget. Ratcheting effect occurs in capital expenditures, PAD does not affect Regional Expenditures. Budget ratcheting weakens the relationship between Regional Original Revenue and Regional Expenditure.

Keywords : Local Revenue; Budget Ratcheting; Capital Expenditure.

How to cite (APA 6th style)

Hidayah, A.N. & Sari, V.F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (1), 165-177.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sistem penganggaran di Indonesia tidak lagi menggunakan sistem tradisional, melainkan menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja. Setiap pegawai yang ditugaskan biasanya berupaya sedemikian rupa agar anggaran yang telah tersedia bisa terserap habis tanpa mempertimbangkan hasil dan kualitasnya hal ini timbul karena sistem penganggaran tradisional, kinerja diukur dari realisasi anggaran yang tersedia.

Orientasi penganggaran berbasis kinerja berbeda dengan sistem penganggaran tradisional, sistem penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada output dan outcome anggaran yang menunjukkan hasil dari penggunaan anggaran yang tersedia. Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dimaksudkan agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk merespon tuntutan masyarakat, dan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang transparansi, dan akuntabel. Dengan demikian dalam penyusunan anggaran, pemerintah dituntut untuk agar memperhitungkan secara cermat, akurat dan sistematis, sebab penyusunan rencana kerja berkaitan erat dengan rencana strategis (renstra).

Proses penyusunan anggaran diawali dari perencanaan kinerja yang akan dicapai. Perencanaan anggaran berbasis kinerja menggambarkan hasil kinerja yang akan dicapai

yang dijabarkan dalam program dan perincian dari kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu tertentu. Pada akhir tahun anggaran setiap lembaga dan negara dan kementerian diwajibkan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan program yang direncanakan sesuai dengan alokasi dan target kegiatan yang akan dilakukan. Rencana tersebut dituangkan dalam dokumen RKAK/L yang merupakan usulan resmi lembaga negara/kementerian sebagai dasar pembahasan oleh DPR RI untuk ditetapkan sebagai RAPBN (Kuncoro Adhi, 2019). Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2004 setiap program dan jenis kegiatan diperlukan 3 (tiga) komponen yaitu indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja.

Anggaran berbasis kinerja yang disusun oleh pemerintah berisi tentang kapasitas kinerja, target kinerja yang harus dicapai, dan alokasi biaya yang sesuai dengan jenis kegiatan dan sasaran program. Penggunaan berbagai jenis anggaran sebagai dasar dalam penentuan target anggaran, hal ini merupakan konteks yang menunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran ada kecenderungan untuk melakukan perubahan pada anggaran (inkrementalisme) (Vinna Novita Sari, 2020).

Pemerintah dalam menyusun anggaran cenderung untuk menggunakan ukuran kinerja tahun sebelumnya (Weitzman, 1980). Sehingga dalam melakukan perubahan anggaran, dari anggaran yang sudah ditetapkan kemungkinan akan “*ratchet*” seperti anggaran sebelumnya, artinya untuk jenis anggaran yang dianggap “menguntungkan” akan diikuti dengan standar kinerja yang lebih tinggi, sebaliknya varian dianggap tidak menguntungkan akan diikuti oleh standar kinerja yang lebih rendah. *Ratchet* anggaran yang demikian sangat dimungkinkan pula dalam pengalokasian belanja modal.

Penetapan alokasi belanja modal, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pengalokasian belanja modal dimaksudkan agar diperoleh aktiva tetap, dengan demikian dengan pengalokasian belanja modal, maka pemerintah daerah akan mendapatkan aset. Faktor belanja pembangunan daerah, merupakan penentu pertumbuhan ekonomi (Priyo Hari Adi, 2006). Belanja modal untuk membangun infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, adanya peningkatan pelayanan, maka investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah.

Besarnya alokasi belanja modal dirasa mampu memberikan pengaruh langsung pada kepentingan publik dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat serta mampu mendorong terciptanya efisien dan efektif (Rahadi dan Safri, 2014). Penelitian Yunus dan Amirullah (2019) membuktikan bahwa Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja modal pemerintah selalu menunjukkan persentase yang menyedihkan. Data dari Kementerian Keuangan bahkan mengungkapkan, bahwa sejak 2009 persentase belanja modal mulai lebih kecil ketimbang belanja barang (Ismail dan Dewi, 2016). Alokasi Belanja modal pada RAPBN Tahun 2022, sebesar Rp 196,61 triliun. Artinya anggaran belanja modal di Tahun 2022 turun 8,6% dibandingkan *outlook* belanja modal 2021 yang sebesar Rp 215,14 triliun dan hanya naik 3% dibandingkan belanja modal dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 190,92 triliun (Masitoh, 2021).

Penelitian terkait dengan penelitian yang akan dilakukan ini, pernah dilakukan oleh Fauzan (2020), hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi perilaku *ratcheting* dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Penelitian Abdullah (2016), menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan sendiri dengan belanja daerah, dan *Budget Ratcheting* memoderasi hubungan pendapatan sendiri dengan belanja daerah. Penelitian Adyatma dan Meita (2015), Nurin (2016), Agus dan Ainur (2013), dan Arbie (2013) menyimpulkan hasil yang berbeda. Penelitian

Lilis Marlina (2018), menyimpulkan bahwa *Budget Ratcheting* berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun besarnya modal pada tahun 2019 mengalami penurunan. Artinya peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Barat tidak disertai dengan meningkatnya belanja modal. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Dari uraian di atas, maka penelitian ini perlu dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, sebab ditempat ini penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan *Budget Ratcheting* (BR) terhadap Alokasi Belanja Modal belum pernah dilakukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah terjadi *budget reching* (BR) dalam anggaran pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019? (2) Apakah terjadi BR dalam alokasi belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019? (3) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019? (4) Apakah BR memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019?

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui *BR* dalam anggaran pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019. (2) Untuk mengetahui *budget reching* dalam alokasi belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019. (3) Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019. (4) Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal dengan moderasi *BR* di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan yang bersumber dari wilayah sendiri merupakan bagian dari penerimaan daerah. Penerimaan ini diperoleh melalui pungutan berdasarkan peraturan daerah (Suhanda, 2007: 156). Menurut Halim (2007 : 96) pendapatan asli daerah diperoleh melalui pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain yang bersumber dari wilayah ekonomi asli daerah. Senada dengan pernyataan tersebut Nurcholis (2007 : 182) menyatakan bahwa PAD merupakan penerimaan yang diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.

Alokasi Belanja Modal

Halim (2012: 107) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pos pengeluaran dalam APBD untuk belanja peralatan yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja modal merupakan pos pengeluaran untuk menambah *property* atau peralatan yang sifatnya tetap, dan akan menambah kekayaan daerah, selanjutnya juga akan menambah biaya rutin seperti biaya pemeliharaan peralatan.

Budget Ratcheting

Ratcheting merupakan salah satu aspek dalam penganggaran yang terjadi akibat target anggaran tahun berjalan dipengaruhi oleh silisih antara target tahun sebelumnya dan kinerja tahun sebelumnya (Aranda dan Davilla 2010). *Ratcheting* terjadi karena adanya kecenderungan dalam penggunaan target kinerja tahun berjalan sebagai ukuran dalam merencanakan target pada masa mendatang (Lee, 2007). *BR* diartikan sebagai fenomena perilaku tidak jujur penyusun anggaran yang menggunakan patokan tahun sebelumnya sebagai tolok ukur target kinerja tahun berjalan. Pengukuran *ratcheting* dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$PAD_t - PAD_{t-1} = \sigma + \beta(PADR_{t-1} - PAD_{t-1}) + \varepsilon \text{ (Aranda, et al. (2010))}$$

Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019

Penyusunan PAD merupakan kegiatan menentukan *revenue forecast* untuk mendukung *development function* dan *public service function*. Namun dalam menentukan PAD pemerintah sering melakukan kesalahan dalam menentukan target PAD yang berakibat target PAD *overforecast* atau lebih *underforecast* dari kapasitas fiskal yang sesungguhnya (Annisa, 2020: 30).

Penelitian Annisa (2020) membuktikan bahwa pada PAD terjadi *budget ratcheting*. Penelitian Vinna (2020) membuktikan bahwa terdapat *BR* dalam anggaran pendapatan daerah. Tingkat *BR* tertinggi di Sumatera yaitu di Kota Palembang dengan persentase 65,9%, disusul kota Langsa sebesar 50,39% dan tingkat berikutnya Kota Padang sebesar 45,76%.

H1: Terjadi *BR* dalam penganggaran PAD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.

Pengaruh Budget Ratcheting terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016-2019

BR timbul ketika target anggaran tahun ini dipengaruhi oleh perbedaan antara kinerja dan target kinerja tahun sebelumnya (Aranda, Arellano, dan Davila, 2010). Lee dan Plummer (2007) menyimpulkan *ratchet* anggaran selalu terjadi pada penganggaran pemerintah. Hasil penelitian Lee dan Plummer tersebut mengindikasikan peningkatan anggaran modal disebabkan adanya kelebihan belanja tahun sebelumnya. Penelitian Lilis (2018) membuktikan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh *BR*. Penelitian Lilis (2018) membuktikan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh *BR*.
H2 : *BR* berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD, untuk itu PAD mendapat perhatian agar selalu ditingkatkan. Kemandirian daerah dalam penganggaran pada era otonomi, benar-benar dituntut agar penganggaran ditujukan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunan anggaran besar kecilnya alokasi belanja perlu mempertimbangkan pendapatan asli

daerah, termasuk alokasi belanja modal (Halim, 2004). Penelitian Lilis (2018), penelitian Juniawan, Ari dan Suryantini (2018) Yani dan Erpita (2019) dan penelitian Yunistin,dkk. (2016), membuktikan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh BR, dengan demikian dapat disusun hipotesis:

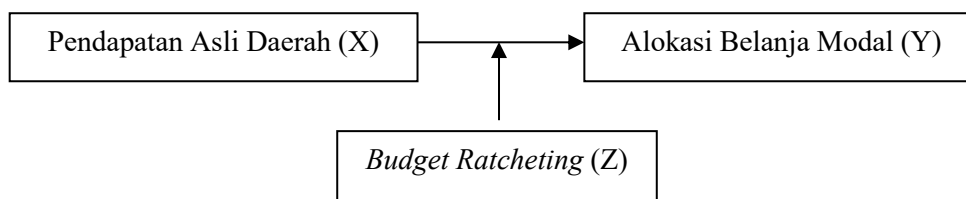
H3 : PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Moderasi *budget ratcheting* di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019

Belanja modal merupakan pos pengeluaran APBD. Anggaran ini termasuk jenis belanja daerah yang besar kecilnya menyesuaikan dengan penerimaan daerah. Pengeluaran untuk belanja modal juga dipengaruhi oleh selisih anggaran pada tahun sebelumnya yang mengakibatkan adanya efek *Ratcheting* (Darise, 2018). Hasil penelitian Safitri dan Sari (2020) berkesimpulan bahwa pada penganggaran PAD dan dana pembangunan terdapat *BR* dan *BR* terbukti memperlemah pengaruh PAD dengan belanja daerah namun bersifat memperlemah.

H4 : *Budget ratcheting* memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kausatif yaitu suatu studi untuk membuktikan penyebab dari suatu permasalahan (Sugiyono, 2016). Tujuannya untuk menganalisis *BR* dalam anggaran PAD dan belanja modal. Penelitian ini berupaya untuk membuktikan hubungan PAD dengan alokasi belanja modal, dan menganalisis *BR* dalam memoderasi pengaruh PAD terhadap alokasi belanja Modal. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh laporan keuangan Pemda Sumatera Barat yang dipublikasikan, sampel diambil sebagian dari laporan keuangan, yang berupa data time series LKPD yang berupa APBD dan LRA Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung, dan data tersebut telah tersedia data dalam penelitian yang berupa laporan keuangan dipublikasikan secara umum, dengan metode dokumentasi yaitu cara untuk

mendapatkan data melalui pengumpulan dokumen. Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksudkan adalah laporan keuangan yang telah dipublikasikan periode 2016-2019.

Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan variabel moderasi, maka teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis regresi moderasi (*MRA*). Melalui teknik tersebut, maka akan diperoleh jawaban apakah variabel moderasi berperan memperkuat atau memperlemah variabel dependen dengan variabel independen. Model persamaan atas pengujian analisis regresi moderasi sebagai berikut:

$$ABJ = a + b_1PAD + b_2BR + b_3PAD \times BR + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mendeskripsikan nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi pada setiap variabel.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	76	10,47	11,92	10,9666	0,28425
Belanja Modal	76	10,89	11,69	11,3079	0,16225
Budget Ratcheting	76	0,00	2,30	1,8929	0,30343
Valid N (listwise)	76				

Tabel 1 menunjukkan bahwa: Variabel PAD yang dihitung dengan beberapa pejumlahan atas pos-pos pendapatan yang ada pada LRA memiliki rentang nilai dari 10,47 sampai dengan 11,92. Nilai rata – rata PAD adalah 10,9666 dan memiliki nilai standar deviasi 0,28425. Variabel Belanja Modal yang dihitung dengan penjumlah beberapa pos Belanja yang ada pada LRA memiliki rentang nilai 10,89 sampai dengan 11,69. Nilai rerata BD adalah 11,3079 dan memiliki standar deviasi sebesar 0,16225. Untuk *Budget Ratcheting* yang dihitung menggunakan model Aranda (2010) memiliki rentang nilai 0,00 sampai dengan 2,30. Dimana rerata dari *Budget Ratcheting* adalah 1,8929 dan memiliki standar deviasi sebesar 0,30343.

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

N	76	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000
	Std. Deviation	0,1382
	Positive	0,054
Test Statistic	0,661	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,776	

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,776, nilai tersebut lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi

perbedaan yang signifikan data dalam penelitian, dengan demikian distribusi data normal.

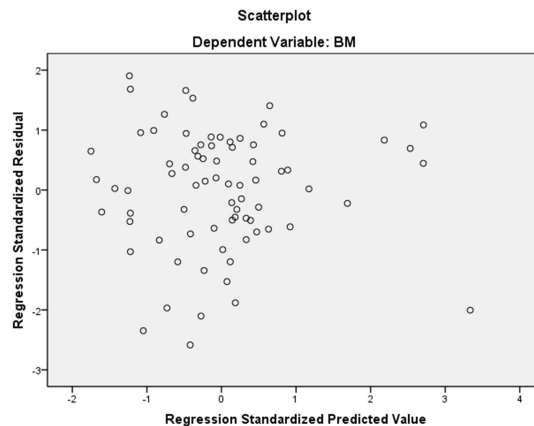
Uji Multikolinieritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	0,989	1,011
<i>Budget Ratcheting</i>	0,989	1,011

Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan VIF, menunjukkan nilai VIF PAD sebesar 1,011, *Tolerance* sebesar 0,989, dan nilai VIF *Budget Ratcheting* 1,011, *Tolerance* 0,989. Artinya nilai *Tolerance* semua variabel $> 0,1$, nilai VIF < 10 . Hal menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1 menunjukkan penyebaran titik berpola acak dan tersebar diatas nilai 0 dan sumbu Y, dengan demikian berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan *scatter plot* disimpulkan tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Pengujian Hipotesis

Hasil regresi BR dalam PAD menunjukkan nilai koefisien *ratcheting* dalam anggaran PAD adalah sebesar (-0,098), artinya Koefisien *ratcheting* $\neq \lambda$, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terjadi efek *ratcheting* dalam anggaran PAD. Berdasarkan hasil olah data *budget rechating* dalam belanja modal menunjukkan nilai koefisien *BR* dalam BM sebesar (-0,037), artinya Koefisien *BR* $\neq \lambda$. Maka dapat dinyatakan bahwa terjadi *budget ratcheting* dalam belanja modal.

Hasil regresi BR dalam BM menunjukkan bahwa nilai koefisien *budget ratcheting* dalam belanja modal adalah sebesar (-0,037). Maka dapat dinyatakan bahwa terjadi efek *budget ratcheting* dalam belanja modal. Hasil olah data pengaruh PAD terhadap belanja modal menunjukkan besarnya konstanta 8,034, artinya jika nilai PAD konstan, maka nilai BD menjadi 8,034. Nilai koefisien regresi PAD (X_1) 0,299, artinya

jika PAD meningkat satu satuan maka BMakan meningkat 0,299 satuan. Nilai koefisien regresi PAD menunjukkan nilai positif sebesar 0,299 terhadap Belanja Modal, artinya jika PAD meningkat, maka akan diikuti peningkatan Belanja Modal.

Hasil analisis regresi pengaruh PAD terhadap BM, menunjukkan besarnya konstanta 8,034, artinya jika nilai PAD konstan, maka nilai BD menjadi 8,034. Nilai koefisien regresi PAD (X_1) 0,299, artinya jika PAD meningkat satu satuan maka BMakan meningkat 0,299 satuan. Nilai koefisien regresi PAD menunjukkan nilai positif sebesar 0,299 terhadap Belanja Modal, artinya jika PAD meningkat, maka akan diikuti peningkatan Belanja Modal.

Berdasarkan tabel statistik untuk $Df = 76 - 3 = 73$ dengan taraf signifikansi 0,05% adalah 1,666. Nilai hasil perhitungan SPSS menunjukkan bahwa besarnya t untuk variabel PAD adalah -0,578, artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $(-0,578) < 1,666$, dengan nilai Signifikansi (sig) sebesar 0,565, artinya hipotesis penelitian ini yang menyatakan terdapat berpengaruh terhadap belanja modal tidak terbukti. Sedangkan nilai t untuk *Budget Ratcheting* sebesar -1.152, artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $(-1.152) < 1,666$ dengan nilai Signifikansi (sig) sebesar 0,253, artinya tidak ada pengaruh budget ratching dengan belanja modal. Nilai t Variabel Pendapatan Asli Daerah X *Budget Ratching* sebesar 1,149, artinya nilai t hitung $< t$ tabel atau $1.149 < 1,666$, dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,254 artinya PAD x BR tidak terdapat pengaruh terhadap belanja modal.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8
Koefisien Determinasi PAD terhadap Belanja Modal

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,523 ^a	0,273	0,264	0,13923

Tabel 9
Koefisien Determinasi PAD, BR, dan PAD x BR terhadap Belanja Modal

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,536 ^a	0,287	0,257	0,13985

Hasil uji koefisien determinasi PAD terhadap BM menunjukkan Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,273 atau 27,3%. Artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 0,273 atau 27,3% berpengaruh terhadap PAD, sedangkan sisanya sebesar 72,7% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil uji koefisien determinasi PAD, BR dan PAD x BR terhadap BM, menunjukkan Nilai *Adjusted R square* mengalami kenaikan menjadi 0,287 atau 28,7%. Dengan demikian BR sebagai variabel moderasi memperlemah dalam memoderasi PAD terhadap BM.

Signifikansi Simultan

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 9,651 yang artinya lebih dari F tabel statistik atau $,651 > 3,12$ ($F_{hitung} > F_{tabel}$), dengan nilai probabilitas sebesar 0,00. Hal ini dapat dimaknai bahwa model yang digunakan untuk menguji PAD adalah fit. Persamaan regresi dapat dinyatakan signifikan yang berarti bahwa PAD dan BR berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

PEMBAHASAN

***Budget Ratcheting* Dalam Anggaran Pendapatan Asli Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek BR terjadi pada PAD. Nilai *Ratchat* dari Uji Regresi Pertumbuhan memperlihatkan sebesar $-0,098$ ($0 \neq \lambda$). Hal ini membuktikan bahwa terjadi efek BR pada PAD. *Ratcheting* terjadi karena adanya kecenderungan dalam penggunaan target kinerja tahun berjalan sebagai ukuran dalam merencanakan target pada masa mendatang (Lee, 2007). Penelitian Annisa Ayu Safitri dan Vita Fitria Sari (2020) membuktikan bahwa terjadi efek BR pada PAD, dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian tersebut.

Dari uraian di atas, membuktikan bahwa terjadinya efek BR pada PAD, menunjukkan bahwa dalam menyusun anggaran PAD, penyusun anggaran cenderung *underforecast* pada tahun berjalan (*slack*). Kecenderungan perilaku penyusun anggaran tersebut akan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup pemerintah.

***Budget Ratcheting* dalam Belanja Modal**

Besarnya nilai koefisien ratcheting dalam belanja modal $-0,037$, hal ini membuktikan bahwa terjadi efek *budget ratcheting* dalam BM. Nilai koefisien negatif dapat dimaknai jika *BR* meningkat 1 satuan, maka BM akan turun sebesar 1 satuan. Koefisien *BR* sebesar $-0,037$ artinya nilai koefisien *Budget Ratcheting* dalam Belanja Modal lebih kecil dari nol (0). Terbuktinya hipotesis yang menyatakan terdapat *efek budget ratcheting* dalam belanja modal, dengan demikian penelitian ini mendukung penelitian Safitri & Sari (2020). Sekaligus mendukung penelitian Susanto & Halim (2016).

Adanya varians negatif pada tahun sebelumnya ditanggapi oleh penyusun anggaran sebagai faktor yang menentukan besar kecilnya anggaran pada tahun berjalan. Dengan demikian adanya efek BR pada BM, tidak terlepas dari peran perilaku penyusun anggaran yang tidak jujur yang dipelopori oleh permasalahan keagenan dan perilaku oportunistik dari berbagai pihak.

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Penelitian ini membuktikan bahwa PAD tidak berpengaruh dan signifikan terhadap BM yang ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $(-0,578) < 1,666$, dengan nilai sig sebesar $0,565 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis tidak terbukti. Tidak terbuktinya hipotesis tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya PAD tidak diberengi dengan besar kecilnya BM di Pemkab Kota di Provinsi Sumatera Barat. Padahal ditinjau dari kemanfaatan BM

Hal ini dapat dipahami, sebab BM merupakan belanja rutin, seperti pemeliharaan aset, dan penambahan aset yang sangat dibutuhkan dalam rangka menopang pelayanan masyarakat, sehingga anggaran BM lebih mempertimbangkan faktor pemenuhan keperluan publik. Sehingga pada tahun anggaran 2016-2019 peningkatan pendapatan asli daerah tidak dibarengi dengan peningkatan biaya modal.

Berbeda dengan penelitian Yani Rizal & Erpita (2019) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap BM, yang dibuktikan dengan besarnya nilai koefisien sebesar 1,211. Penelitian Saraswati & Ramantha (2018), menunjukkan hasil yang sama yaitu adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Dengan demikian hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian-penelitian tersebut.

Budget Ratcheting Memoderasi Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hasil analisis regresi membuktikan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap BM, hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $(-0,578) < 1,666$. Nilai Signifikansi (sig) $0,565 > 0,05$, sedangkan BR terhadap BM, nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $(-1.152) < 1,666$, dengan nilai sig sebesar $0,253 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa BR tidak berpengaruh terhadap BM. Variabel PAD X BR memperoleh nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $1.149 < 1,666$, dengan nilai sig $0,254 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh.

Adjusted R Square sebesar 0,273 atau 27,3%. Artinya variabel terikat yaitu BM dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 0,273 atau 27,3%, sedangkan sisanya sebesar 72,7% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain. Sedangkan pada tabel 4.12 *Adjusted R Square* mengalami kenaikan menjadi 0,287 atau 28,7%. Artinya variabel pendapatan asli daerah dan budget ratcheing menjelaskan variabel belanja modal sebesar 28,7%, sedangkan 71,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya.

Sejalan dengan penelitian Andrian dan Sari (2020), yang membuktikan bahwa *Budget Ratcheting* merupakan variabel moderasi yang memperlemah terhadap hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah. Hal ini sekaligus mendukung penelitian Abdullah, Syukriy (2016) yang menyimpulkan *budget ratcheting* (BR) memoderasi hubungan antara pendapatan sendiri dengan belanja daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pengujian terhadap 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sampel sebanyak 94 dari tahun 2016 – 2019 dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Budget Ratcheting dalam Pendapatan Asli Daerah.
Besarnya koefisien *ratcheting* dalam anggaran PAD hasil pengujian regresi $-0,098$, hal ini membuktikan bahwa terjadi efek *ratcheting* dalam anggaran PAD.
2. Budget Ratcheting dalam Belanja Modal. Hasil pengujian regresi pertumbuhan menunjukkan bahwa nilai koefisien *ratcheting* dalam belanja modal adalah sebesar $(-0,037)$. Hal ini membuktikan bahwa terjadi efek *ratcheting* dalam belanja modal.
3. Pengaruh pendapatan asli daerah dengan belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0.578 > 1,661$ dan sig $0,001 < 0,005$, sehingga memberikan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dan hal ini tidak mendukung hipotesis yang dirumuskan. Dimana hal ini juga menunjukkan hubungan negatif, ketika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka akan berdampak pada penurunan pada Belanja modal.
4. *Budget Ratcheting* merupakan variabel moderasi yang memperlemah terhadap hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan penurunan pada *Adjusted R Square* pertama 0,374 atau 37,4% dan mengalami penurunan setelah regresi kedua (MRA) menjadi 0,361 atau 36,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Budget Ratcheting* memperlemah dalam hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu:

1. Peneliti hanya meneliti secara umum untuk pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, sehingga untuk lebih memberikan hasil yang baik dilakukan penelitian SKPD pemerintah daerah tersebut.
2. Pengaruh dari variabel yang telah ditentukan peneliti memiliki tingkatan yang kecil sehingga hasil kurang memuaskan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Menambah cakupan atas sampel yang akan dilakukan pada penelitian selanjutnya, seperti SKPD Pemerintah Daerah.
2. Menambah variabel penelitian yang memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah, seperti luas wilayah, jumlah anggota parlemen, dan lain-lain.
3. Menjadikan *Budget Ratcheting* sebagai variabel terikat, sehingga kemungkinan untuk memberikan hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2016). Bukti Empiris Tentang Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Aceh. *MODUS, Vol. 28 (2): 185-201, ISSN 0852-1875*
- Adyatma, E. dan Oktaviani, R.M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi; *ISSN 1979 – 4878. Volume 4 Nomer 2 November 2015.*
- Agus B.S. dan Mohamad A.R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2010). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2013, Hal. 184 – 198 Vol. 20, No. 2 ISSN: 1412-3126, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang.*
- Andrean, A. dan Vita F.S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah dan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No. 1, Seri A, Hal. 1984-2000, ISSN: 2656-3649*
- Aranda, C., Arellano, J., & Davila, A. (2010). Ratcheting and the role of relative target setting. *the accounting review* , 1197-1226
- Arbie, Gugus W. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal. 2 (1) 2013: p.44-51*
- Darise, N. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks
- Fauzan M. (2020). Budget Ratcheting in Governmental Budgeting: An Empirical Investigation, *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Volume 6, Number 1, e-ISSN 2549-452X, p-ISSN 2460-3937*
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*, Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

- Halim, A. dan Kusufi, M.S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail U., dan Dewi, K.S. (2016). Kebijakan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia, *Jurnal Quality*, Volume VI, No. 23. September 2016: 245 – 271
- Jaya, I P.N.P.K dan Dwirandra, A.A.N.B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):79-92*.
- Juniawan, M.A. dan Suryantini Ni P.S. (2018), Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali, *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, page 1255-1281, ISSN: 2302-8912*
- Kuncoro Adhi, Abdul Hakim dan Mochamad Makmur, 2019, Proses Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, *Jurnal Profit, Volume 13, No 1, <https://profit.ub.ac.id>*.
- Lee, T., & Plummer, E. (2007). Budget Adjustments in Response to Spending Variances: Evidence of Ratcheting of Local Government Expenditures. *Journal of Management Accounting Research* , 137-167.
- Lilis M., (2018), Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Budget Ratcheting Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akbis volume 2 tahun 2018*
- Masitoh, S. (2021). Belanja modal di RAPBN 2022 lebih rendah, bisa kurang multiplier effect ekonomi, <https://nasional.kontan.co.id>.
- Nurcholis, H. (2007), *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Nurin, H. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal: Ekonomi UMS* , hal. 13-19
- Priyo, A.H. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi, Agustus 2006*
- Rahadi S., dan Safri M. (2014). Peningkatan Belanja Modal Dan Hubungannya Terhadap Peningkatan Belanja Aset Dan Pad Provinsi Jambi, *Jurnal Paradigma Ekonomi*, Vol.9, No. 1, April 2014.
- Safitri, A.A.dan Vita F. S. (2020). Efek Budget Ratcheting Pada Anggaran Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No. 3, Seri A, Hal 2992-3011, ISSN: 2656-3649*
- Saraswati, IA. dan Ramantha, I W. (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 24.1. page: 662-686, ISSN: 2302-8556*
- Sugiarti dan Supadmi. (2014). Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7(2): 477-495, ISSN: 2302-8556*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhanda. (2007). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi
- Susanto, A. A. dan Abdul H. (2016), Efek Ratchet pada Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik. Volume 1. nomor 1. hal 88-96*.

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- Vinna Novita Sari, Suhairi, dan Nini Syofriyeni, 2020, Efek Ratchet Terhadap Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kota Se Sumatera, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 20 nomor 1, pp 183-186
- Weitzman, M. L. (1980). The Ratchet Principle and Performance Incentives. *The Bell Journal of Economics* 11: 302-308. Web: <http://scholar.harvard.edu/files/weitzman/files/ratchetprincipleperformanceincentives.pdf> (20/1/15)
- Yani R. dan Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 1
- Yunistin N., Jullie J.S. dan Winston P. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16 No. 03.